Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui penguatan fungsi pelayanan publik, yang OUTCOME KOTA SKW berbasis inovasi Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya kinerja publik dalam penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah pemerintahan daerah IK: 1. indeks pengelolaan keuangan ULTIMATE 1. Indeks Pelayanan Publik daerah OUTCOME 2. Indeks Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya Kepuasan Masyaraat INTERMEDIATE IK: Terhadap Pelayanan Publik OUTCOME 1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah IK: 2. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya sumber penerimaan baru Meningkatnya penerimaan pajak daerah dari Meningkatnya sistem tata kelola pendapatan Meningkatnya Kualitas Pelavanan Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan (ekstensifikasi pajak daerah) Perpajakan Daerah wajib pajak yang sudah terdata (intensifikasi daerah Pendapatan daerah IMMEDIATE Pajak daerah) OUTCOME 1. Persentase peningkatan penerimaan pajak 1. Persentase terlaksananya kegiatan IK: 1. Persentase capaian target peningkatan 1. Persentase Layanan Pajak Daerah daerah dari sumber penerimaan baru 1. Persentase peningkatan penerimaan sistem tata kelola pendapatan daerah pembinaan dan pengawasan paiak daerah dari wajib pajak yang sudah terdata Terlaksananya Penilaian Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta (PBBP2) serta (BPHTB) Daerah Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah Pajak Daerah OUTPUT dan Kebijakan Pajak Daerah 1. Jumlah Dokumen Tertanggihnya Wajib Pajak 1. Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan 1. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak yang Memiliki Piutang Pajak. 1. Jumlah Laporan Permasalahan yang 1. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Telah Ditindaklanjuti dan Belum NJOPnva Daerah Ditindaklanjuti Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Terlaksananya Sistem Pengelolaan Data Pelaporan Pajak Daerah Paiak dan Waiib Paiak Daerah Kebijakan Pajak Daerah 1. Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Administrasi Perkantoran IK: Ditindaklanjuti 1. Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan 1. Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan 1. Persentase terlaksananya Penuniang Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pendaftaran Objek Pajak Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah urusan pemerintah Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pajak Daerah Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 1. Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Daerah Retribusi Daerah 1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak 1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Daerah Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non TunailK: 1. Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah